

**PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MENGGUNAKAN KONSEP
GREEN ECONOMY DI KOTA MOJOKERTO**

Melda Eka Fernia

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ferniamelda@gmail.com

Anggraeny Puspaningtyas

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Eddy Wahyudi

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
eddy@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Local economic development in the modern era requires an approach that is not only oriented towards growth alone, but also considers aspects of sustainability. This study aims to analyze how local economic development uses the green economy concept in Mojokerto City. The method used is descriptive qualitative with a focus on the main indicators, namely local economic development indicators according to Blakely and Leigh (2013), and green economy indicators based on the Bappenas concept. The results of the study show that the Mojokerto City government has integrated the principles of green economy in local economic development through job creation based on local potential, increasing community income, UMKM empowering, and strengthening institutions. The application of green economy is also seen in economic, social, and environmental aspects that encourage inclusive, equitable, and sustainable development. This study recommends the existence of special regulations on green economy at the regional level to support development transformation that is oriented towards long-term sustainability.

Keywords: *Green Economy, Local Economic Development, Mojokerto City*

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi lokal di era modern menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, melainkan juga memperhatikan aspek keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan ekonomi lokal menggunakan konsep green economy di Kota Mojokerto. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada

indikator utama, yaitu indikator pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely dan Leigh (2013), serta indikator green economy berdasarkan konsep Bappenas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Mojokerto telah mengintegrasikan prinsip-prinsip green economy dalam pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan penguatan kelembagaan. Penerapan green economy juga terlihat pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi khusus tentang green economy di tingkat daerah untuk mendukung transformasi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Kata kunci: *Green Economy, Pengembangan Ekonomi Lokal, Kota Mojokerto*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi penting dalam memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal serta keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat. Di tengah tantangan global seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan tekanan ekonomi, pendekatan ini semakin relevan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekonomi lokal perlu diarahkan untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kota Mojokerto menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, terutama dari sektor perdagangan dan UMKM yang mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian, tantangan sosial seperti pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan kemiskinan masih cukup tinggi. Selain itu, persoalan lingkungan seperti volume sampah yang meningkat dan keterbatasan ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah telah berupaya mendorong pembangunan yang inklusif melalui program pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing lokal. Namun, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan belum sepenuhnya optimal.

Green economy hadir sebagai pendekatan alternatif yang mengedepankan efisiensi sumber daya, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Konsep ini dipromosikan oleh UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan diadopsi oleh Bappenas dalam kerangka pembangunan nasional. Melalui pendekatan, pembangunan daerah diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan yang rendah karbon, ramah lingkungan, dan inklusif. Penerapan konsep ini di daerah perlu dikaji agar dapat menyesuaikan dengan karakteristik lokal. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terhadap penerapan konsep dalam konteks pengembangan ekonomi lokal.

Upaya integrasi konsep *green economy* dalam pengembangan ekonomi lokal tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah menjalankan berbagai program yang mendorong pertumbuhan UMKM berbasis potensi lokal. Namun, sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsip ramah

lingkungan seperti efisiensi energi atau pengelolaan limbah. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan dan edukasi agar prinsip keberlanjutan benar-benar diterapkan di tingkat pelaku usaha. Namun, hingga kini belum diketahui secara menyeluruh bagaimana kebijakan pengembangan ekonomi lokal di Kota Mojokerto telah mengadopsi prinsip . Dengan demikian, transformasi ekonomi lokal menuju membutuhkan sinergi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat.

B. KAJIAN TEORITIS

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan (Budiharsono, 2022). Pendekatan ini muncul sebagai respons atas ketimpangan pembangunan dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal (Mandhaputri et al., 2023). Dalam konteks otonomi daerah, pengembangan ekonomi lokal memberikan keleluasaan bagi pemerintah lokal untuk merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Proses ini tidak hanya berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi sosial dan kelembagaan yang berkelanjutan (Rodriguez-Pose & Tjimstra, dalam Mandhaputri et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan mandiri di tingkat lokal.

Menurut Blakely dan Leigh (2013), terdapat empat indikator utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, perluasan kesempatan kerja dan usaha, yang mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja berbasis potensi daerah serta mendorong munculnya usaha-usaha baru. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat, sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi lokal yang didorong oleh produktivitas dan daya saing sektor-sektor unggulan. Ketiga, pemberdayaan UMKM, karena UMKM merupakan sektor paling fleksibel dan menyerap banyak tenaga kerja, serta memiliki potensi besar untuk tumbuh di tingkat lokal. Keempat, peningkatan kualitas kelembagaan, yang merujuk pada efektivitas tata kelola pemerintahan lokal, keberpihakan kebijakan, dan kemampuan berjejaring antar pemangku kepentingan. Keempat indikator tersebut saling terkait dan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang berbasis pada kekuatan internal wilayah.

Dalam konteks pelaksanaan, keberhasilan pengembangan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, kemudahan akses terhadap permodalan, serta dukungan regulasi yang kondusif. Sebaliknya, penghambat pengembangan ekonomi lokal meliputi praktik korupsi, ketidakstabilan harga, suku bunga tinggi, dan lemahnya infrastruktur ekonomi (Budiharsono, 2022). Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan inklusif. Ketika dikombinasikan dengan prinsip-prinsip *green economy*, pendekatan pengembangan ekonomi lokal berpotensi besar mendukung transformasi menuju pembangunan yang adil, ramah

lingkungan, dan berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan lokal dan keberlanjutan global menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi daerah yang tangguh terhadap tantangan masa depan. Pendekatan lokal dan keberlanjutan global menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi daerah yang tangguh terhadap tantangan masa depan.

Green Economy

Green economy merupakan konsep pembangunan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), *green economy* adalah ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (Mubarok, 2023). Konsep ini lahir sebagai respons terhadap krisis lingkungan global akibat praktik ekonomi yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. *Green economy* mendorong peralihan dari pembangunan berbasis karbon tinggi ke pembangunan rendah karbon yang memanfaatkan energi terbarukan, meminimalisir limbah, serta menjaga keberlanjutan ekosistem.

Di Indonesia, konsep *green economy* telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan nasional, khususnya melalui arah pembangunan rendah karbon yang dicanangkan oleh Bappenas. Pemerintah Indonesia mendefinisikan *green economy* sebagai pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Bappenas juga mengembangkan indikator *green economy* pada aspek ekonomi sebagai alat ukur yang melibatkan intensitas emisi, pendapatan nasional bruto per kapita, intensitas energi final, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa, serta indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, aspek lingkungan mencakup persentase luas tutupan lahan, bauran energi terbarukan, persentase sampah terkelola, persentase penurunan emisi kumulatif, dan penurunan tutupan lahan gambut. Melalui pendekatan ini, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan pemerataan kesejahteraan.

Integrasi *green economy* ke dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk menciptakan model pembangunan daerah yang berkelanjutan. *Green economy* memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang mendukung efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta partisipasi pelaku usaha dalam praktik *green economy* (Mandhaputri et al., 2023). Khususnya pada sektor UMKM, pendekatan ini mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi ke arah produksi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *green economy* tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada inisiatif daerah dan kesiapan masyarakat lokal untuk beradaptasi. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, *green economy* dapat menjadi fondasi utama bagi

pembangunan ekonomi yang tahan terhadap krisis sosial dan lingkungan di masa depan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengembangan ekonomi lokal menggunakan konsep *green economy* di Kota Mojokerto. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagai institusi utama dalam pengelolaan UMKM dan pembangunan ekonomi daerah. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam kepada Kepala Bidang Perindustrian, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai pengembangan ekonomi lokal di Kota Mojokerto dengan menggunakan pendekatan konsep *green economy*. Pembahasan diawali dengan analisis terhadap indikator pengembangan ekonomi lokal sebagaimana dikemukakan oleh Blakely dan Leigh (2013), pengembangan ekonomi lokal yang efektif harus menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. yang meliputi perluasan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, keberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas kelembagaan lokal. Keempat indikator tersebut menjadi fondasi penting untuk memahami struktur ekonomi daerah sebelum menelaah integrasi prinsip-prinsip *green economy*. Selanjutnya pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama dalam pendekatan *green economy*, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masing-masing aspek dianalisis melalui indikator-indikator yang relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pembangunan di Kota Mojokerto.

1. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal di Kota Mojokerto merupakan fondasi awal dalam mendorong pertumbuhan wilayah yang berbasis potensi lokal dalam menilai kesiapan daerah menuju pembangunan berkelanjutan. Untuk melihat sejauh mana penguatan ekonomi berbasis potensi lokal telah berjalan, digunakan empat indikator utama berdasarkan pendekatan Blakely dan Leigh (2013), yaitu perluasan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, keberdayaan UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan di tingkat lokal. Keempat indikator tersebut menjadi pijakan untuk melihat sejauh mana Kota Mojokerto siap bertransformasi menuju arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal di Kota Mojokerto mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Blakely dan Leigh (2013), pengembangan ekonomi lokal yang efektif harus menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,

memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal (Adilah et al., 2022).

Perluasan Kesempatan Kerja dan Usaha

Perluasan kesempatan kerja dan usaha merupakan salah satu tujuan utama dari pengembangan ekonomi lokal karena menyangkut keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Di Kota Mojokerto, hal ini tercermin melalui jumlah UMKM yang mencapai 29.993 unit pada tahun 2024, yang sebagian besar bergerak di sektor perdagangan, kuliner, dan industri kreatif, sehingga membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat setempat, terutama dalam sektor informal dan rumah tangga. Pemerintah daerah berupaya menciptakan lapangan kerja baru melalui program pelatihan, bantuan peralatan usaha, serta fasilitasi pemasaran bagi pelaku UMKM. Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sangat strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, agar dapat mandiri secara ekonomi. Pertumbuhan UMKM yang signifikan turut membuka peluang kerja informal yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi usaha konvensional menuju usaha berbasis digital dan ramah lingkungan sebagai bagian dari adaptasi terhadap ekonomi modern. Meskipun sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami konsep keberlanjutan, pelatihan yang diberikan mulai mengarah pada efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menambah jumlah pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan ketahanan usaha. Dengan memperluas akses kerja yang inklusif dan adaptif, Kota Mojokerto menunjukkan upaya awal menuju pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator ini menjadi titik tolak dalam menilai keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang produktif.

Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi lokal yang berkeadilan. Di Kota Mojokerto, peningkatan ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 8,6 triliun pada tahun 2024. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 30,62% dari total PDRB, yang menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 1 PDRB Kota Mojokerto Tahun 2024 Berdasarkan Lapangan Usaha

Sektor ekonomi	Kontribusi terhadap PDRB (%)	Pertumbuhan Tahun 2024 (%)
Perdagangan besar dan eceran	30,62%	5,21%
Industri pengolahan	9,12%	3,65%

Konstruksi	4,30%	5,50%
Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,50%	4,10%
Informasi dan komunikasi	7,92%	7,92%
Jasa keuangan dan asuransi	5,40%	6,80%
Jasa lainnya	13,10%	8,35%

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2024 (diolah penulis)

Dukungan pemerintah Kota Mojokerto dilakukan melalui adanya pelatihan, fasilitasi perizinan, dan penguatan jejaring usaha juga turut mendorong peningkatan pendapatan pelaku UMKM dan pekerja informal. Hal ini memberikan gambaran bahwa penguatan sektor ekonomi lokal memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, belum semua masyarakat merasakan peningkatan pendapatan secara merata.



Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto
Sumber: Satu Data Informasi Kota Mojokerto, 2024 (diolah penulis)

Grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Mojokerto pada tahun 2024 masih berada pada angka 5,57%, dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 610.968 per kapita per bulan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kelompok rentan yang masih belum terintegrasi optimal dalam sistem ekonomi lokal. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tidak hanya perlu dikejar dari sisi nominal, tetapi juga melalui pemerataan akses terhadap peluang usaha dan sumber daya. Pemerintah perlu terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi yang menyasar kelompok miskin agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih inklusif.

Keberdayaan UMKM

Keberdayaan UMKM merupakan indikator yang menunjukkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses sumber daya ekonomi, mengelola usahanya secara mandiri, dan terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi lokal. Di Kota Mojokerto, pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, bantuan peralatan produksi, hingga penguatan pemasaran digital. salah satu bentuk konkret pemberdayaan di Kota Mojokerto adalah pengembangan Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra, yang menjadi pusat produksi dan promosi produk industri batik. Dukungan pemerintah ini bertujuan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan juga membuka akses terhadap pembiayaan usaha yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku UMKM.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, yang menekankan kemandirian dan penguatan kapasitas internal pelaku usaha. Todaro dan Smith (2012) menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan instrumen penting dalam pemerataan manfaat pembangunan dan pengurangan ketimpangan sosial. Meskipun demikian, masih banyak UMKM yang beroperasi secara tradisional tanpa inovasi dan belum memiliki daya saing tinggi. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar pemberdayaan UMKM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, keberdayaan UMKM harus tetap dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Kualitas kelembagaan lokal menjadi elemen kunci dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah yang terarah dan berkelanjutan. Di Kota Mojokerto, fungsi kelembagaan dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi. Kelembagaan ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Keberadaan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Rencana Strategis memperkuat arah kebijakan yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh efektivitas dan responsivitas institusi publik.

Selain itu, koordinasi antar bidang dalam kelembagaan juga memungkinkan integrasi program lintas sektor yang efisien. Ketersediaan data UMKM, sistem pelayanan perizinan online, serta pelibatan komunitas dalam forum ekonomi menjadi indikator meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya digitalisasi sistem, serta rendahnya inovasi dalam pelayanan publik. Kelembagaan lokal dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek struktur organisasi, sumber daya, maupun budaya kerja.

Pembahasan mengenai indikator pengembangan ekonomi lokal di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui indikator kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan kelembagaan, terlintas bahwa pembangunan diarahkan tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Peran UMKM yang dominan dalam perekonomian lokal menjadi titik tumpu dalam penyediaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Selain itu, penguatan kelembagaan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan telah mulai diarahkan secara sistematis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pengembangan ekonomi lokal menjadi fondasi penting bagi transformasi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti pemerataan hasil pembangunan, peningkatan daya saing UMKM, serta penyesuaian program pemberdayaan dengan prinsip keberlanjutan. Meskipun indikator-indikator ekonomi lokal telah menunjukkan tren yang positif, integrasi nilai-nilai keberlanjutan masih perlu diperkuat, terutama dalam konteks kesiapan menghadapi perubahan iklim dan disrupsi digital. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal harus terus dioptimalkan dengan pendekatan partisipatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Selanjutnya, peneliti akan mengkaji aspek-aspek *green economy* untuk menilai sejauh mana prinsip *green economy* telah diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto. Integrasi antara pendekatan ekonomi lokal dan *green economy* diharapkan mampu membentuk model pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

2. **Green Economy**

Green economy merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini menjadi alternatif dari model pembangunan konvensional yang seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan secara jangka panjang. Di Kota Mojokerto, prinsip-prinsip *green economy* mulai diadopsi melalui kebijakan daerah yang mendorong efisiensi sumber daya, pemberdayaan sosial, serta perlindungan ekosistem. Untuk mengetahui sejauh mana penerapannya, penelitian ini mengkaji tiga aspek utama dalam *green economy*, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut dianalisis secara menyeluruh guna menilai kesesuaian arah pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Green Economy Aspek Ekonomi

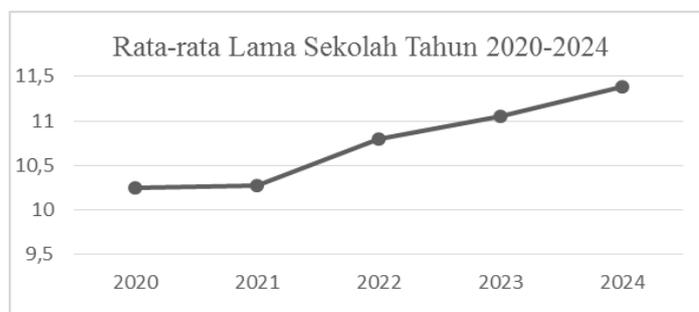
Aspek ekonomi dalam *green economy* menitikberatkan pada pertumbuhan yang inklusif, efisien, dan rendah emisi, yang mendukung transformasi ekonomi jangka panjang. Di Kota Mojokerto, hal ini tercermin dari upaya penguatan sektor UMKM yang diarahkan untuk mengadopsi

praktik usaha berkelanjutan, seperti penggunaan energi hemat, pengurangan limbah, dan optimalisasi teknologi digital. Untuk mengukur pencapaian aspek ini, perlu menganalisis dan memperhatikan enam indikator pada aspek ekonomi ini, diantaranya intensitas emisi, intensitas energi final, pendapatan nasional bruto per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri, dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Meskipun sebagian data seperti intensitas emisi dan energi final belum tersedia secara spesifik di tingkat kota, arah kebijakan pemerintah mulai menunjukkan upaya untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi dari aktivitas ekonomi.

Pendapatan per kapita yang terus meningkat serta dominasi sektor jasa dalam struktur ekonomi daerah menunjukkan potensi penguatan kapasitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, produktivitas tenaga kerja di sektor industri dan jasa menjadi sorotan karena keduanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berpotensi tinggi untuk diintervensi secara hijau. Upaya mendorong efisiensi energi di sektor industri kecil dan menengah, serta pelatihan keterampilan ramah lingkungan di sektor jasa, menjadi langkah konkret yang perlu diperluas. Namun, pencatatan dan pelaporan data indikator hijau di tingkat kota masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan dan pengukuran indikator *green economy* yang lebih terstruktur agar pengambilan kebijakan dapat terbukti. Dengan integrasi keenam indikator ini, aspek ekonomi dalam *green economy* dapat menjadi fondasi penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap produktif, adil, dan ramah lingkungan.

Green Economy Aspek Sosial

Aspek sosial dalam *green economy* menekankan pentingnya pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari aspek sosial ini, yakni rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data menunjukkan bahwa RLS mencapai 9,08 tahun dan AHH sebesar 75,99 tahun per 2024, yang menandakan kualitas pendidikan dan kesehatan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Capaian ini menjadi modal sosial yang mendukung transformasi menuju pembangunan yang inklusif.



Gambar 2 Rata-rata lama sekolah Di Kota Mojokerto
Sumber: Satu Data Informasi Kota Mojokerto, 2024 (diolah penulis)



Gambar 3 Angka Harapan Hidup Di Kota Mojokerto
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2024 (diolah penulis)

Namun demikian, tantangan sosial masih terlihat dari angka kemiskinan sebesar 5,57% dan TPT sebesar 3,76%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian makro positif, masih terdapat kelompok rentan yang belum optimal terlibat dalam aktivitas *green economy*. Pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan, pelatihan kerja, serta bantuan UMKM sebagai upaya memperluas keterlibatan masyarakat. *Green economy* dalam aspek sosial mensyaratkan adanya pemerataan akses terhadap pembangunan agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Oleh karena itu, penguatan aspek sosial perlu diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam membangun sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan.



Gambar 4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mojokerto
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2024 (diolah penulis)

Green Economy Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan elemen vital dalam penerapan *green economy* karena berkaitan langsung dengan daya dukung ekosistem dan kelestarian sumber daya alam. Aspek ini dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu persentase tutupan lahan, bauran energi terbarukan, persentase sampah terkelola, penurunan emisi kumulatif dari baseline, dan penurunan tutupan lahan gambut. Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan beberapa langkah seperti pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), pengendalian alih fungsi lahan, serta penerapan pembatasan pembangunan. Pemanfaatan energi

terbarukan masih terbatas pada penggunaan panel surya di beberapa tempat, sehingga perlu diperluas agar berdampak signifikan terhadap bauran energi daerah. Sementara itu, sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*) sudah mulai diterapkan, namun efektivitas dan jangkauannya belum optimal.

Beberapa indikator, seperti penurunan emisi dan degradasi lahan gambut belum memiliki data baseline yang terukur secara jelas di tingkat kota, sehingga evaluasinya masih bersifat deskriptif. Meskipun demikian, kebijakan terkait perlindungan lingkungan telah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, yang menunjukkan komitmen awal menuju pembangunan hijau. Aspek lingkungan menuntut adanya sinergi antara kebijakan, infrastruktur, dan inovasi teknologi agar transisi menuju *green economy* dapat dilakukan secara menyeluruh. Tantangan terbesar terletak pada integrasi data dan minimnya investasi pada teknologi lingkungan. Oleh karena itu, penguatan aspek lingkungan menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan daerah dalam jangka panjang.

E. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Kota Mojokerto telah mendukung arah pembangunan berkelanjutan berbasis *green economy*. Hal ini terlihat dari capaian positif pada indikator kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan penguatan kelembagaan. Di sisi lain, penerapan prinsip *green economy* juga tercermin melalui peningkatan produktivitas sektor jasa dan industri. Aspek sosial menunjukkan perkembangan yang baik dari sisi pendidikan dan kesehatan, namun tantangan masih ada pada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Aspek lingkungan telah diperkuat melalui kebijakan ruang terbuka hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah, walau masih terdapat kendala.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan strategi penguatan kelembagaan yang responsif terhadap transisi menuju *green economy*. Pemerintah juga perlu memperluas edukasi dan pelatihan kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait praktik ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan penyusunan dan penguatan regulasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan program *green economy* secara lebih sistematis dan terukur. Kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan komunitas lokal penting untuk mempercepat keberhasilan implementasi *green economy*. Dengan langkah yang tepat dan strategis, Kota Mojokerto dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi lokal berbasis *green economy* yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, N., Cikusin, Y., & Hayat. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 1–8.
- Budiharsono, S. (2022). *Teori Pengembangan Ekonomi Lokal* (Issue June).
- Mandhaputri, H. A., Aribowo, & Riasih, T. (2023). Pengembangan Ekonomi Lokal

Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karamatwangi.
LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial, 5(2), 115–134.

Mubarok, D. (2023). Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Bina Ummat*, 6(2), 31–52.